



KABUPATEN BADUNG

PERJANJIAN KINERJA

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG**

TAHUN ANGGARAN 2019 PERUBAHAN

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG
AGUSTUS, 2019**



Anak Lampiran I/2-6

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.A. Ngurah Bayu Kumara Putra, ST. MT
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Giri Prasta
Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 29 Agustus 2019

BUPATI BADUNG

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung

I NYOMAN GIRI PRASTA

A. A. Ngurah Bayu Kumara Putra, ST. MT
Pembina Tk I
Nip. 19670425 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka upaya mewujudkan *Good governance*, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja PD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu dokumen yang dipergunakan adalah dokumen Perjanjian Kinerja dari masing-masing PD guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, merupakan suatu dokumen pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Dilaksanakan antara pengemban tugas (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung) dengan atasannya (Bupati Badung) berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi .

Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun –tahun sebelumnya . Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah maka Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Perumahan

- b. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan
 - c. Seksi Pemeliharaan Prasarana, Sarana Utilitas
4. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
 - c. Seksi Peningkatan Prasarana dan Utilitas Kawasan
5. Bidang Pengawasan dan Verifikasi terdiri dari:
- a. Seksi Verifikasi Prasarana, Sarana Utilitas
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Pelaporan

3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran

Sasaran Strategis dari program dan kegiatan di Tahun 2019 yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- 1). Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan
- 2). Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan Permukiman
- 3). Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang memadai
- 4). Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

2. Indikator Kinerja

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai sampai pada akhir Tahun 2019. Indikator Kinerja yang ditetapkan telah mengalami revisi guna mewujudkan kinerja yang lebih baik seperti pada lampiran dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Lampiran PK.1).

3. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Pencapaian target pada indikator kinerja tak lepas dari program, kegiatan serta alokasi anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung pada Tahun 2019. Terdapat 9 program yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung seperti pada lampiran dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Lampiran PK.2)

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 dibuat dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan mekanisme dan penyediaan kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap – tiap unit kerja dan personil didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya di dalam kegiatan bidang perumahan.

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung**

A.A Ngurah Bayu Kumara Putra, ST. MT

Pembina Tk. I

Nip. 19670425 199803 1 006

LAMPIRAN

Tabel 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Sasaran Kabupaten : Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas								
1	Peningkatan Kualitas Rumah dan Lingkungan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100,00%	Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan:	2 kegiatan	440.320.600,00	432.963.100,00	(7.357.500,00)
				1 Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung		382.777.600,00	375.420.100,00	(7.357.500,00)
			2 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung		57.543.000,00	57.543.000,00	-	
Sasaran Kabupaten : Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana								
1	Tanggap Bencana Lingkungan Perumahan dan	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi	100,00%	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Kegiatan:	1 kegiatan	10.700.900,00	10.700.900,00	-

	Permukiman	Korban Bencana		1	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat Bencana		10.700.900,00	10.700.900,00	-
Sasaran Kabupaten : Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas									
1	Lingkungan Yang Sehat dan Nyaman didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	84,80%	Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan:		40 kegiatan	50.170.869.261,90	33.041.682.763,00	(17.129.186.498,90)
				1	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi		237.482.450,00	-	(237.482.450,00)
				2	Peningkatan Jalan Desa di Desa Buduk Kecamatan Mengwi		1.197.737.000,00	1.270.000,00	(1.196.467.000,00)
				3	Peningkatan Jalan Desa di Desa Munggu Kecamatan Mengwi		781.753.850,00	720.000,00	(781.033.850,00)
				4	Peningkatan Jalan Desa di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara		2.337.562.250,00	2.337.562.250,00	-
				5	Peningkatan Jalan Desa di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara		1.554.258.400,00	1.600.000,00	(1.552.658.400,00)

6	<i>Peningkatan Jalan Desa di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara</i>		<i>1.559.789.100,00</i>	<i>1.559.789.100,00</i>	<i>-</i>
7	<i>Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta</i>		<i>1.368.340.600,00</i>	<i>1.270.000,00</i>	<i>(1.367.070.600,00)</i>
8	<i>Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta</i>		<i>2.557.213.945,00</i>	<i>2.480.000,00</i>	<i>(2.554.733.945,00)</i>
9	<i>Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan</i>		<i>2.372.582.950,00</i>	<i>1.160.000,00</i>	<i>(2.371.422.950,00)</i>
10	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang</i>		<i>1.029.197.700,00</i>	<i>800.487.100,00</i>	<i>(228.710.600,00)</i>
11	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang</i>		<i>1.631.043.138,70</i>	<i>1.304.834.511,00</i>	<i>(326.208.627,70)</i>
12	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang</i>		<i>1.385.029.685,60</i>	<i>1.211.900.975,00</i>	<i>(173.128.710,60)</i>
13	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang</i>		<i>894.798.151,50</i>	<i>695.954.118,00</i>	<i>(198.844.033,50)</i>

14	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal		1.405.326.154,20	1.229.660.385,00	(175.665.769,20)
15	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal		1.049.540.702,50	882.607.552,00	(166.933.150,50)
16	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal		963.977.806,10	749.760.516,00	(214.217.290,10)
17	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan Abiansemal		666.066.555,00	518.051.765,00	(148.014.790,00)
18	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal		585.000.000,00	455.000.000,00	(130.000.000,00)
19	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal		534.857.315,10	-	(534.857.315,10)

			20	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kecamatan Abiansemal</i>		432.140.451,40	217.989.255,00	(214.151.196,40)
			21	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal</i>		670.746.277,70	293.451.497,00	(377.294.780,70)
			22	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi</i>		418.094.935,90	365.833.069,00	(52.261.866,90)
			23	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi</i>		1.033.763.436,20	827.010.749,00	(206.752.687,20)
			24	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara</i>		395.155.965,60	395.155.163,00	(802,60)
			25	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara</i>		432.000.000,00	431.779.510,00	(220.490,00)

26	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara		1.105.000.078,60	884.000.063,00	(221.000.015,60)
27	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara		1.130.806.080,00	989.455.320,00	(141.350.760,00)
28	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara		1.032.322.424,00	580.681.331,00	(451.641.093,00)
29	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara		2.279.482.478,60	1.823.585.983,00	(455.896.495,60)
30	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta		762.821.206,00	381.410.603,00	(381.410.603,00)
31	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta		1.276.316.517,60	558.388.477,00	(717.928.040,60)
32	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di		714.507.105,60	555.727.749,00	(158.779.356,60)

--	--	--

	<i>Kecamatan Kuta</i>				
33	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta</i>		<i>731.730.611,30</i>	<i>731.334.838,00</i>	<i>(395.773,30)</i>
34	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kecamatan Kuta</i>		<i>492.094.772,80</i>	<i>491.977.441,00</i>	<i>(117.331,80)</i>
35	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan</i>		<i>783.176.957,90</i>	<i>609.137.634,00</i>	<i>(174.039.323,90)</i>
36	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan</i>		<i>2.440.575.002,50</i>	<i>2.351.604.631,00</i>	<i>(88.970.371,50)</i>
37	<i>Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan</i>		<i>715.500.000,00</i>	<i>556.500.000,00</i>	<i>(159.000.000,00)</i>

				38	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	824.698.727,90	797.969.431,00	(26.729.296,90)
				39	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan	3.707.709.508,60	3.089.852.207,00	(617.857.301,60)
				40	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	4.680.668.970,00	4.354.729.540,00	(325.939.430,00)
		Persentase drainase lingkungan yang berkondisi baik	59,03%		Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan:	1.040.000.088,00	910.000.077,00	(130.000.011,00)
				1	Pembuatan drainase dan penutup Jalan Lingkar Barat Pasar Mambal di Kecamatan Abiansemal	1.040.000.088,00	910.000.077,00	(130.000.011,00)
		Persentase Perumahan dengan Sarana, Prasarana, Utilitas (PSU) yang berfungsi baik	23,00%		Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan:	1.676.995.541,00	1.861.738.141,00	184.742.600,00
				1	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	1.074.830.180,00	1.067.472.680,00	(7.357.500,00)

2	Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung		97.955.310,00	95.945.810,00	(2.009.500,00)
3	Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung		176.809.752,00	166.999.752,00	(9.810.000,00)
4	Rekomendasi Blok Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah di Kabupaten Badung		23.186.635,00	23.186.635,00	-
5	Penyusunan FS Pengadaan Lahan Taman Pahlawan Carang Sari		152.106.832,00	152.106.832,00	-
6	Penyusunan FS Pengadaan Lahan Parkir Pura Petitenget		152.106.832,00	152.106.832,00	-
7	Pengadaan Plakat Bagi Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2019		-	203.919.600,00	203.919.600,00
Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman Kegiatan:		4 kegiatan	5.202.648.708,60	5.600.530.875,13	397.882.166,53
1	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Utara		1.031.279.051,30	837.722.001,00	(193.557.050,30)
2	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan		2.611.791.900,00	2.606.890.710,00	(4.901.190,00)

				3	Pemeliharaan PSU Terpadu Perumahan Bhineka Nusa kauh di Kecamatan Kuta Utara (Lanjutan)		1.559.577.757,30	1.052.790.314,13	(506.787.443,17)
				4	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan di Kabupaten Badung		-	1.103.127.850,00	1.103.127.850,00
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100,00%	Pelayanan Adminsitrase Perkantoran		16 kegiatan	5.016.852.848,77	1.754.779.379,00	(3.262.073.469,77)
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi		12.000.000,00	2.500.000,00	(9.500.000,00)
				2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		26.250.000,00	26.250.000,00	-
				3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		59.384.952,00	59.384.952,00	-
				4	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan		3.833.394.586,29	700.000.000,00	(3.133.394.586,29)
				5	Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan		46.070.631,00	46.070.631,00	-
				6	Penyediaan Peralatan Rumah tangga		1.050.000,00	1.050.000,00	-

				7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		51.990.000,00	51.990.000,00	-
				8	Penyediaan Makanan dan Minuman		20.820.000,00	20.820.000,00	-
				9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		150.000.000,00	150.000.000,00	-
				10	Penyediaan Dekorasi		5.000.000,00	5.000.000,00	-
				11	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan		411.840.000,00	411.840.000,00	-
				12	Penyediaan Upacara Keagamaan		28.208.000,00	28.208.000,00	-
				13	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap		195.737.879,48	184.058.996,00	(11.678.883,48)
				14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/		3.500.000,00	3.500.000,00	-
				15	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh PPHP		64.106.800,00	64.106.800,00	-
				16	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat		107.500.000,00	-	(107.500.000,00)
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		8 kegiatan	724.536.735,00	707.996.595,00	(16.540.140,00)

1	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas		151.406.000,00	151.406.000,00	-
2	Pemeliharaan peralatan kantor		25.150.000,00	25.150.000,00	-
3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		6.000.000,00	6.000.000,00	-
4	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5	Penataan Arsip DPKP		25.299.000,00	25.299.000,00	-
6	Survey Hasil Musrenbang RKPd		159.694.340,00	160.321.700,00	627.360,00
7	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Uang		332.842.070,00	315.674.570,00	(17.167.500,00)
8	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang/Jasa		19.145.325,00	19.145.325,00	-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		2 kegiatan	1.025.845.800,00	1.156.525.800,00	130.680.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		1.019.544.000,00	1.150.224.000,00	130.680.000,00

				2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		6.301.800,00	6.301.800,00	-
					Peningkatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 kegiatan	10.129.400,00	10.129.400,00	-
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD		10.129.400,00	10.129.400,00	-
					Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1 kegiatan	12.903.396,00	12.903.396,00	-
				1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung		12.903.396,00	12.903.396,00	-
	Jumlah						65.331.803.279,27	45.499.950.426,13	(19.831.852.853,14)

No	Program	Anggaran (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Ket (Sumber dana)
1	Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.117.316.141,00	2.294.701.241,00	177.385.100,00	APBD
2	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	10.700.900,00	10.700.900,00	-	APBD
3	Lingkungan Sehat Perumahan	51.210.869.349,90	33.951.682.840,00	(17.259.186.509,90)	APBD
4	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.202.648.708,60	5.600.530.875,13	397.882.166,53	APBD
5	Pelayanan Adminsitirasi Perkantoran	5.016.852.848,77	1.754.779.379,00	(3.262.073.469,77)	APBD
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	724.536.735,00	707.996.595,00	(16.540.140,00)	APBD
7	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.025.845.800,00	1.156.525.800,00	130.680.000,00	APBD
8	Peningkatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10.129.400,00	10.129.400,00	-	APBD
9	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	12.903.396,00	12.903.396,00	-	APBD
TOTAL BELANJA LANGSUNG		65.331.803.279,27	45.499.950.426,13	(19.831.852.853,14)	

BUPATI BADUNG

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

I NYOMAN GIRI PRASTA

A. A. Ngurah Bayu Kumara Putra, ST. MT
Pembina Tk I
Nip. 19670425 199803 1 006